

**TUMPANG TINDIH PENGUSAAN TANAH YANG TELAH
BERSERTIFIKAT OLEH MASYARAKAT TERHADAP
TANAH NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR
POKOK-POKOK AGRARIA**
**(Studi Kasus Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kep. Bangka Belitung)**

SKRIPSI



Oleh :
Reni Jayanti
NIM: 401.14.11.085
Program Kekhususan: Keperdataan

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

**TUMPANG TINDIH PENGUSAAN TANAH YANG TELAH
BERSERTIFIKAT OLEH MASYARAKAT TERHADAP
TANAH NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR
POKOK-POKOK AGRARIA**

**(Studi Kasus Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kep.
Bangka Belitung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Jurusan Hukum-Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :
Reni Jayanti
NIM: 401.14.11.085
Program Kekhususan: Keperdataan

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJK
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Jayanti

Nim : 401.14.11.085

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Tumpang Tindih Penguasaan Tanah Yang Telah Bersertifikat Oleh Masyarakat Terhadap Tanah Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Kasus Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kep. Bangka Belitung).**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis



Reni Jayanti

HALAMAN PERSETUJUAN

TUMPANG TINDIH PENGUSAAN TANAH YANG TELAH BERSERTIFIKAT OLEH MASYARAKAT TERHADAP TANAH NEGARA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

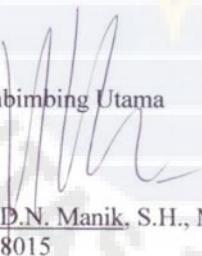
(Studi kasus Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kep. Bangka
Belitung)

SKRIPSI

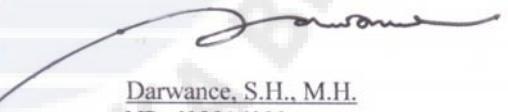
Oleh :
Reni Jayanti
NIM 401.14.11.085
Program Kekhususan : Keperdataan

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama


Dr. Jeane D.N. Manik, S.H., M.Hum
NP.607308015

Pembimbing Pendamping


Darwance, S.H., M.H.
NP. 608816033

Mengetahui,
A.n. Ketua Jurusan Hukum
Sekretaris Jurusan


Rio Armando Agustian, S.H.,M.H.
NP.608410029

HALAMAN PENGESAHAN

TUMPANG TINDIH PENGUSAAN TANAH YANG TELAH
BERSERTIFIKAT OLEH MASYARAKAT TERHADAP TANAH
NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
(Studi Kasus Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kep.
Bangka Belitung)

SKRIPSI

Oleh:
Reni Jayanti
NIM: 401.14.11.085
Program Kekhususan: Keperdataan

Telah dipertahankan di depan majelis pengaji
Pada tanggal 9 Juli 2018
Dan dinyatakan LULUS

Majelis Pengaji

1. Ketua Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP. 606007014
2. Sekretaris Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.
NP. 608410029
3. Anggota Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.
NIP. 1980121720142001
4. Anggota Dr. Jeanne D.N. Manik, S.H., M.Hum
NP. 607308015

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung

Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP. 606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

❖ MOTTO

“Hal paling penting dalam hidup bukanlah kemenangan, melainkan usaha keras.

Yang paling utama bukanlah menaklukkan, melainkan berjuang sekuat tenaga”

(Baron Pierre de Coubertin)

“lebih baik tak punya apa-apa, tapi senang hati daripada bergelimang harta namun tak bahagia”

(Ki Hajar Dewantara)

❖ PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Allah SWT. Karena atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
- Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Jamhir dan Ibunda Nurzami yang selalu memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
- Saudara-saudara saya, adinda Bima Irawan dan adinda Rafi Akbar, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan ini.
- Sahabat ku yang tersayang, Jung Revi, Jung Evi, Jung Sulis, Jung Ani, Chu, Cha, Anjar, Pit, Yusuf, Hasyim, yang tiada henti memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Teman-teman seperjuangan “The Genxs 5” (Mbak Muti, Yuk Nura, Uni Iref, Helda, Dedel), yang selalu memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
 - Keluarga saya di DPC Permahi Babel yang sangat saya banggakan, seperti: Nura, Mutia, Sarinah, Riska, Gloudya, Seftri, Via, Dina, Damai, Rozi, Gomgom, dan Jimmy
 - Seluruh teman-teman keluarga KKN Lingkungan Rambak yang telah memberikan pengalaman yang sangat berarti selama 40 hari.
- **ALMAMATER TERCINTA SAYA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.**

ABSTRAK
Reni Jayanti
401.14.11.085

**TUMPANG TINDIH PENGUSAAN TANAH YANG TELAH
BERSERTIFIKAT OLEH MASYARAKAT TERHADAP TANAH
NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
(Studi Kasus Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kep.
Bangka Belitung)**

Skripsi. Fakultas Hukum. 2018
Kata Kunci: Penguasaan, Sertifikat Tanah, Tanah Negara

Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang penggunaannya dilimpahkan langsung kepada pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum. Tanah yang berada dalam penguasaan negara adalah milik negara dan masyarakat dilarang untuk menguasai, memanfaatkan dan mempergunakan tanah tersebut karena dikhawatirkan akan merugikan masyarakat itu sendiri jika sewaktu-waktu negara ingin mengambil tanah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengangkat permasalahan pengaturan mengenai tumpang tindih penguasaan tanah yang telah bersertifikat oleh masyarakat terhadap tanah negara dan akibat hukum jika terjadi tumpang tindih penguasaan tanah oleh masyarakat terhadap tanah negara. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Juridis-Normatif. Metode pendekatan yang digunakan penulis antara lain dengan cara pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara studi kepustakaan. Kemudian teknik analisis terhadap bahan hukum yang digunakan penulis yaitu dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa pengaturan mengenai tumpang tindih penguasaan tanah terhadap tanah negara tidak jelas, karena pengertian penguasaan tanah negara antara menurut UUD NRI tahun 1945, UUPA, dan PP Nomor 8 Tahun 1953 berbeda dan akibat hukum terhadap tumpang tindih penguasaan tanah oleh masyarakat terhadap tanah negara adalah salah satu sertifikatnya batal demi hukum atau dianggap tidak ada sebelumnya juga menguasai tanah negara dapat diancam dengan ancaman pidana.

ABSTRACT

Reni Jayanti

OVERLAPPING CONTROL HAS BEEN CERTIFIED BY THE LAND OF LAND OF THE COMMUNITY BASED ON LAW NUMBER 5 YEAR 1960 REGARDING THE REGULATION OF THE BASIC PRINCIPLES AGRARIA

Thesis Faculty of Law. 2018

Keywords: Tenure, Land Certificates, State Land

State land is land that is directly controlled by the state are transferred directly to the government use that is used in the public interest. Land in the possession of the state are state owned and the public are forbidden to dominate, exploit and use the land because it was feared would harm the community itself if at any time the state wants to take the land. Based on the background of the above problems, the authors raised the issue of overlapping arrangements regarding control of land that has been certified by the people against the state land and the legal consequences if there is an overlap of land ownership by the people against the state land. This type of research used by the author in this study is the juridical-normative research. The method used by the author, among others by means of law approach, historical approach and conceptual approaches. Data collection techniques used by the author is by way of literature study. Then engineering analysis of legal materials used writer is the qualitative analysis. The results of the research that has been done is that the arrangement of the overlapping control of land to state land is not clear, because the sense of mastery of state land between by the Constitution NRI 1945, BAL, and Government Regulation No. 8 of 1953 is different and the legal consequences of the overlapping control of land by the public on the state land is one of the certificate null and void or deemed not also control the land before the state can be liable to a penalty.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayah-Nya serta tidak lupa shalawat serta salam saya ucapkan kepada Nabi besar junjungan umat muslim Nabi Muhammad SAW. Atas Berkat dan Rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tumpang Tindih Penguasaan Tanah yang Telah Bersertifikat Oleh Masyarakat Terhadap Tanah Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”.**.

Selama menempuh perkuliahan hingga sampai pada tugas akhir kuliah yang melakukan persiapan, penyusunan, sampai diselesaiannya skripsi ini serta dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Dukungan dari berbagai pihak inilah yang menyemangati dalam proses penulisan skripsi ini, oleh karena itu diucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Rio Armando Agustian, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Universitas Bangka Belitung.

4. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviyanti Manik, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama yang selalu memberikan waktu, masukan, arahan dan ide-ide dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Darwance S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang menyumbangkan pemikiran serta memberikan masukan hingga selesaiya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Reko Dwi Salfutra S.H., M.H selaku dosen mata kuliah hukum agraria yang telah sabar dalam memberikan ilmu mengenai pertanahan.
7. Bapak Toni S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak serta Ibu dosen dan staf pengajar serta seluruh Civitas akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan moral, ilmu pengetahuan hukum kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman satu angkatan 2014 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
10. Adik-adik seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja baik dalam isi materi atau penulisan skripsi yang dibuat penulis. Oleh karena itu terbuka kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan penulis dalam menulis karya

ilmiah lainnya. Besar harapan penulis skripsi ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang ilmu hukum, serta memberikan manfaat bagi semua pihak baik penulis sendiri, pembaca, dan terutama almamater saya.

Balunjuk, Juni 2018

Hormat Penulis,

Reni Jayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Bahan Hukum	12
3. Metode Pendekatan	13
4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	14
5. Analisis Bahan Hukum	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	16

1. Teori Penguasaan Tanah	16
2. Teori Fungsi Sosial Hak Atas Tanah	17
3. Teori Perundang-undangan	20
B. Kerangka Konseptual	22
1. Penguasaan Tanah.....	22
2. Sertifikat Tanah.....	36
3. Tanah Negara	43
BAB III TUMPANG TINDIH PENGUASAAN TANAH YANG	
TELAH BERSERTIFIKAT OLEH MASYARAKAT	
TERHADAP TANAH NEGARA DITINJAU DARI	
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960	
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK	
AGRARIA	
A. Profil Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi	
Kep. Bangka Belitung.....	46
B. Pengaturan Mengenai Tumpang Tindih Penguasaan Tanah	
Yang Telah Bersertifikat Oleh Masyarakat Terhadap Tanah	
Negara.....	54
C. Akibat Hukum Jika Terjadi Tumpang Tindih Penguasaan	
Tanah yang Telah Bersertifikat Oleh Masyarakat Terhadap	
Tanah Negara.....	69
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	81

B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85

LAMPIRAN

